

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bidang Kesehatan



Semester 2
Tahun 2025

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
DINAS KESEHATAN

Jl. Kesambi No. 52 Telp 208879 Cirebon 45143

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga atas perkenan-Nya pula kami dapat menyelesaikan Laporan SPM (Standar Pelayanan Minimal) Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Cirebon Semester 2 Tahun 2025.

Laporan SPM Dinas Kesehatan Kota Cirebon Semester 2 Tahun 2025, memberikan gambaran pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan yang dilaksanakan berdasarkan petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 6 tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

SPM mempunyai peranan yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik bagi pemerintah daerah sebagai perangkat yang memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun bagi masyarakat yang mendapatkan pelayanan. Bagi pemerintah daerah SPM dapat dijadikan sebagai tolak ukur (*benchmark*) dalam penentuan biaya yang diperlukan untuk menyediakan pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat, SPM akan menjadi acuan untuk menilai kualitas suatu pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan hingga tersusunnya Laporan SPM Dinas Kesehatan Kota Cirebon Semester 2 Tahun 2025 ini. Semoga laporan ini dapat dijadikan pedoman untuk melaksanakan Pembangunan Kesehatan di Kota Cirebon.

Cirebon, Januari 2026
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Cirebon



dr. Hj. SITI MARIA LISTIAWATY, MM.
NIP. 19751015 200212 2 006

DAFTAR ISI

Judul.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Datar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Dasar Hukum	1
3. Kebijakan Umum	3
4. Arah Kebijakan	5
BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM	7
1. Jenis Pelayanan Dasar	7
2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah	8
3. Realisasi	11
4. Alokasi Anggaran	15
5. Dukungan Personil	17
6. Permasalahan dan Solusi	19
BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN	22
BAB IV PENUTUP	25
1. Kesimpulan	25
2. Saran	26

DAFTAR TABEL DAN LAMPIRAN

Tabel

Tabel 1.1 Indikator SPM Bidang Kesehatan	4
Tabel 2.1 Target Pencapaian SPM Pemerintah Kota Cirebon	8
Tabel 2.2 Realisasi Capaian SPM Bidang Kesehatan Pemerintah Daerah Kota Cirebon Semester 2 Tahun 2025	12
Tabel 2.3 Alokasi Anggaran Dalam Rangka Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	15
Tabel 2.4 Dukungan Personil yang terlibat dalam proses Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Kesehatan.....	17
Tabel 2.5 Permasalahan dan Solusi	19

Lampiran

Target dan Indikator Capaian Standar Pelayanan Minimal.....	I-V
---	-----

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Urusan Pemerintah yang wajib sebagai Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilaksanakan secara bertahap. Penyelenggaraan urusan wajib oleh daerah merupakan perwujudan otonomi yang bertanggungjawab, yang pada intinya merupakan pengakuan / pemberian hak dan kewenangan daerah dalam wujud tugas dan kewajiban daerah. Berdasarkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, maka untuk menjamin terselenggaranya urusan wajib daerah yang berkaitan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga perlu ditetapkan Standar Pelayanan Minimal.

Untuk menyelenggarakan pelayanan dasar di bidang kesehatan kepada masyarakat telah ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Standar Pelayanan Minimal disusun sebagai alat untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata.

2. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
15. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

3. KEBIJAKAN UMUM

Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang, Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa, perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sasaran pembangunan bidang Kesehatan adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Cirebon yang merupakan upaya mendukung Visi Misi Kota Cirebon pada bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sebagai tolok ukur pencapaian sasaran ditetapkan dua indikator yaitu Angka Harapan Hidup dan Cakupan Jaminan

Kesehatan Nasional dimana keduanya juga ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama Kota Cirebon.

Kedua indikator kinerja tersebut ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon Tahun 2024-2026. Dalam RPJMD Tahun 2024-2026, Pemerintah Kota Cirebon menitikberatkan pada pembangunan yang sesuai dengan kondisi kesehatan masyarakat. Dalam melaksanakan urusan wajib bidang kesehatan telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimal sebagai pedoman kegiatan, dengan indikator capaian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Indikator SPM Bidang Kesehatan

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Setiap Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Setiap Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Setiap Bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Setiap warga negara usia 15 tahun sampai 59 mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Setiap warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN				
		2021	2022	2023	2024	2025
8.	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
10.	Setiap Orang Dengan Gangguan Jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
11.	Setiap orang terduga Tuberkulosis (TBC) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
12.	Setiap orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%

4. ARAH KEBIJAKAN

Penentuan program prioritas bidang kesehatan dengan mempertimbangkan keterbatasan alokasi dana dan urgensi yang diformulasikan ke dalam arah dan kebijakan, dimana didalamnya terdiri dari tujuan pelaksanaan program, sasaran yang hendak dicapai, dan indikator pencapaian yang digunakan dalam mengukur keberhasilan dalam pelaksanaan program

Sedangkan beberapa program sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan yaitu program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
 - 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - 2.1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kabupaten/Kota
 - 2.3 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
 - 2.4 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - 3.1 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
 - 3.2 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan
 - 4.1 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
 - 4.2 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
 - 5.1 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 5.2 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah

BAB II

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

A. BIDANG KESEHATAN

Penyelenggaraan pelayanan dasar di bidang kesehatan kepada masyarakat telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Standar Pelayanan Minimal disusun sebagai alat untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Dalam Permenkes Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, untuk skala Pemerintah Kabupaten/ Kota antara lain :

- 1) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- 2) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- 3) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- 4) Pelayanan Kesehatan Balita
- 5) Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar
- 6) Pelayanan kesehatan pada usia produktif
- 7) Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut
- 8) Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi
- 9) Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus
- 10) Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat

- 11) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis dan
- 12) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Penentuan program prioritas bidang kesehatan dengan mempertimbangkan keterbatasan alokasi dana dan urgensi yang diformulasikan ke dalam arah dan kebijakan, dimana didalamnya terdiri dari tujuan pelaksanaan program, sasaran yang hendak dicapai, dan indikator pencapaian yang digunakan dalam mengukur keberhasilan dalam pelaksanaan program.

Berikut ini adalah target pencapaian SPM Pemerintah Kota Cirebon dibandingkan dengan target Nasional (Kemenkes) tahun 2025.

Tabel 2.1 Target Pencapaian SPM Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal			Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Kemenkes	Kota Cirebon	
1	2	3		4	6
1	PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	Setiap Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai standar	100%	100%	DINKES
2	PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	Setiap Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100%	100%	DINKES
3	PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	Setiap Bayi baru lahir mendapatkan	100%	100%	DINKES

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal			Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Kemenkes	Kota Cirebon	
		pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar			
4	PELAYANAN KESEHATAN BALITA	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	DINKES
5	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	DINKES
6	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	Setiap warga negara usia 15 tahun sampai 59 mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	DINKES
7	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	Setiap warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar	100%	100%	DINKES
8	PELAYANAN KESEHATAN	Setiap penderita	100%	100%	DINKES

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal			Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Kemenkes	Kota Cirebon	
	PENDERITA HIPERTENSI	hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
9	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS	Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	DINKES
10	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	Setiap Orang Dengan Gangguan Jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	DINKES
11	PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	Setiap orang terduga Tuberkulosis (TBC) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	DINKES
12	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI VIRUS YANG MELEMAHKAN DAYA TAHAN TUBUH	Setiap orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	DINKES

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal			Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Kemenkes	Kota Cirebon	
	MANUSIA (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)				

3. Realisasi

Program dan kegiatan bidang kesehatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah serta tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan. Program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan. Dalam Komponen kegiatan ditetapkan kelompok indikator kinerja kegiatan, yang meliputi masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*).

Tabel 2.2 Realisasi Capaian SPM Bidang Kesehatan Pemerintah Daerah Kota Cirebon Semester 2 Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal				Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab	Kriteria
		Indikator	Target Kemenkes	Target Kota Cirebon	Nilai Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	Setiap Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai standar	100%	100%	97,21%	DINKES	
2	PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	Setiap Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100%	100%	96,82%	DINKES	
3	PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	Setiap Bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar	100%	100%	97,04%	DINKES	
4	PELAYANAN KESEHATAN BALITA	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	93,96%	DINKES	
5	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	DINKES	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal				Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab	Kriteria
		Indikator	Target Kemenkes	Target Kota Cirebon	Nilai Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
6	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	Setiap warga negara usia 15 tahun sampai 59 mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	DINKES	
7	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	Setiap warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar	100%	100%	100%	DINKES	
8	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	DINKES	
9	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS	Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	DINKES	
10	PELAYANAN KESEHATAN ORANG	Setiap Orang Dengan Gangguan Jiwa berat	100%	100%	100%	DINKES	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal				Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab	Kriteria
		Indikator	Target Kemenkes	Target Kota Cirebon	Nilai Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
	DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					
11	PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	Setiap orang terduga Tuberkulosis (TBC) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	DINKES	
12	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI VIRUS YANG MELEMAHKAN DAYA TAHAN TUBUH MANUSIA (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Setiap orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	DINKES	

4. Alokasi Anggaran

Tabel 2.3 Alokasi Anggaran dalam Rangka Penerapan dan Pencapaian SPM
oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon

No	Jenis Pelayanan Dasar/ Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran		Sumber Dana
			2024 (Rp)	2025 (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	Setiap Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai standar	721.994.375	1.400.263.800	APBD II DAK Non Fisik
2	PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	Setiap Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	957.657.875	395.347.300	APBD II DAK Non Fisik
3	PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	Setiap Bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar	2.587.680.739	616.505.350	APBD II DAK Non Fisik
4	PELAYANAN KESEHATAN BALITA	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	192.650.350	249.085.900	APBD II DAK Non Fisik
5	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	676.165.775	462.841.800	APBD II DAK Non Fisik
6	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	Setiap warga negara usia 15 tahun sampai 59 mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	290.212.250	220.780.126	APBD II DAK Non Fisik
7	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	Setiap warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar	164.714.750	298.866.675	APBD II DAK Non Fisik
8	PELAYANAN KESEHATAN	Setiap penderita hipertensi	70.201.100	69.237.500	APBD II

No	Jenis Pelayanan Dasar/ Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran		Sumber Dana
			2024 (Rp)	2025 (Rp)	
1	2	3	4	5	6
	PENDERITA HIPERTENSI	mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			DAK Non Fisik
9	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS	Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	634.059.872	654.457.200	APBD II DAK Non Fisik
10	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	Setiap Orang Dengan Gangguan Jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	48.324.150	332.324.756	APBD II DAK Non Fisik
11	PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	Setiap orang terduga Tuberkulosis (TBC) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3.163.213.100	2.802.739.180	APBD II DAK Non Fisik GF
12	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI VIRUS YANG MELEMAHKAN DAYA TAHAN TUBUH MANUSIA (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Setiap orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.009.242.000	725.258.725	APBD II DAK Non Fisik GF
	Jumlah Anggaran SPM		10.516.116.366	8.227.708.312	

5. Dukungan Personil

Tabel 2.4 Dukungan Personil Yang Terlibat
dalam Proses Penerapan dan Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar/ Sub Kegiatan	Indikator	Personel		Sumber Dana
			PNS	Non PNS	
1	2	3	4	5	6
1	PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	Setiap Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai standar	25	8	APBD II
2	PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	Setiap Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	25	6	APBD II
3	PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	Setiap Bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar	25	6	APBD II
4	PELAYANAN KESEHATAN BALITA	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	25	6	APBD II
5	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	25	6	APBD II
6	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	Setiap warga negara usia 15 tahun sampai 59 mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	22 di Puskesmas dan 6 di P2PTM	6	APBD II
7	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	Setiap warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar	22	6	APBD II
8	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI	Setiap penderita hipertensi mendapatkan	22 di Puskesmas dan 6 di P2PTM	6	APBD II

No	Jenis Pelayanan Dasar/ Sub Kegiatan	Indikator	Personel		Sumber Dana
			PNS	Non PNS	
1	2	3	4	5	6
		pelayanan kesehatan sesuai standar			
9	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS	Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	22 di Puskesmas dan 6 di P2PTM	6	APBD II
10	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	Setiap Orang Dengan Gangguan Jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	21 di Puskesmas dan 6 di P2PTM	6	APBD II
11	PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	Setiap orang terduga Tuberkulosis (TBC) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	46	60	APBD II, GF
12	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI VIRUS YANG MELEMAHKAN DAYA TAHAN TUBUH MANUSIA (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Setiap orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	25	9	APBD II, GF

6. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Tabel 2.5 Permasalahan dan Solusi
dalam Proses Penerapan dan Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	1. Adanya ibu hamil yang abortus sehingga tidak sampai K6 2. Ibu hamil ANC pertama terhambat di trimester 2 sehingga ANC tidak sesuai standar K6 3. Adanya perpindahan domisili dan andon lahir sehingga ANC tidak mencapai K6 4. Adanya kelahiran kurang bulan sehingga belum ANC sebanyak 6 kali	1. Mencatat jumlah abortus dan dikeluarkan dari sasaran ibu hamil riil agar tidak ada keberlanjutan data 2. Memperkuat deteksi dini kehamilan melalui optimalisasi peran kader dan keluarga agar ibu hamil terjaring sejak trimester 1 3. Memperkuat jejaring Fasyankes KIA dalam pencatatan pelaporan lintas wilayah 4. Analisis faktor risiko sebagai dasar intervensi pencegahan
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	1. Masih ada ibu hamil yang bersalin di rumah dan ditolong oleh dukun (wilayah Kelurahan Argasunya)	1. Sosialisasi dan memaksimalkan pemanfaatan fungsi PONED

No	Jenis Pelayanan Dasar	PERMASALAHAN	SOLUSI
		2. Adanya perpindahan domisili dan andon lahir	2. Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan melalui OJT kegawatdaruratan maternal neonatal 3. Advokasi kelurahan dan tokoh masyarakat dalam edukasi masyarakat untuk bersalin di Fasyankes dan ditolong oleh tenaga kesehatan
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	1. Adanya kematian bayi sebelum 28 hari/kematian neonatal 2. Adanya perpindahan domisili dan andon lahir 3. Belum waktunya tercatat sebagai kunjungan neonatal/ KN 3	1. Melakukan audit kematian neonatal untuk memperoleh rekomendasi tim ahli sehingga angka kematian neonatal dapat menurun 2. Memperkuat jejaring Fasyankes KIA dalam pencatatan dan pelaporan lintas wilayah 3. Mencatat KN 3 yang belum masuk waktunya untuk cakupan tahun selanjutnya
4	Pelayanan kesehatan balita	1. Balita berpindah domisili	1. Pemutakhiran data secara berkala melalui

No	Jenis Pelayanan Dasar	PERMASALAHAN	SOLUSI
		(pendatang/ke luar wilayah) 2. Sasaran balita tidak datang ke fasilitas kesehatan/ Posyandu 3. Capaian imunisasi belum mencapai target 4. Layanan balita yang dilakukan di faskes selain Puskesmas tidak dilaporkan ke Puskesmas wilayah 5. Usia sasaran belum waktunya dihitung sebagai DO sebagai pelayanan sesuai standar	kader, RT/RW dan disdukcapil 2. Peningkatan edukasi keluarga, undangan jadwal Posyandu dan pelayanan kunjungan rumah 3. Penguatan sosialisasi imunisasi kepada keluarga bayi dan balita, sweeping imunisasi 4. Koordinasi dengan Fasyankes swasta jejaring Puskesmas dan penguatan pencatatan serta pelaporan MTBS 5. Sasaran yang usianya belum masuk sesuai DO akan dihitung sebagai capaian tahun selanjutnya
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	1. Capaian SPM sudah mencapai target karena target SPM namun dalam pelaksanaannya ada kendala seperti anak tidak hadir atau	1. Melakukan pemutakhiran data dengan Puskesmas secara berkala 2. Peningkatan edukasi keluarga 3. Penguatan sosialisasi skrining kesehatan anak sekolah

No	Jenis Pelayanan Dasar	PERMASALAHAN	SOLUSI
		penolakan sehingga perlu sweeping dan pendekatan kepada sekolah, orang tua dan siswa	4. Melakukan koordinasi rutin kepada petugas dan sekolah 5. Meningkatkan sweeping skrining
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	1. Capaian SPM sudah mencapai target karena target SPM berdasarkan data riil, cakupan layanan lebih luas dari sasaran yang sudah ditentukan (kolaborasi dengan program CKG), penduduk non domisili ikut terlayani	1. Melakukan validasi sasaran 2. Meningkatkan upaya deteksi dini berkolaborasi dengan program CKG 3. Melakukan skrining di instansi yang berada di wilayah kerja
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	1. Pencatatan dan pelaporan serta koordinasi petugas dan lintas terkait agar dipertahankan dan ditingkatkan	1. Pencatatan dan pelaporan serta koordinasi petugas dan lintas terkait agar dipertahankan dan ditingkatkan

No	Jenis Pelayanan Dasar	PERMASALAHAN	SOLUSI
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	1. Pelayanan belum optimal dan merata di semua fasilitas kesehatan 2. Penderita hipertensi tidak rutin berkunjung ke fasyankes sehingga petugas juga harus aktif menjemput bola	1. Meningkatkan koordinasi/jejaring antar fasyankes penderita hipertensi 2. Meningkatkan edukasi/motivasi kepada penderita hipertensi dan petugas kesehatan 3. Meningkatkan pelayanan kesehatan secara aktif di luar gedung
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	1. Pelayanan belum optimal dan merata di semua fasilitas kesehatan 2. Penderita diabetes melitus tidak rutin berkunjung ke fasyankes sehingga petugas juga harus aktif menjemput bola	1. Meningkatkan koordinasi/jejaring antar fasyankes penderita hipertensi 2. Meningkatkan edukasi/motivasi kepada penderita hipertensi dan petugas kesehatan 3. Meningkatkan pelayanan kesehatan secara aktif di luar gedung
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	1. Masih adanya stigma negatif terhadap ODGJ yang menyebabkan keluarga atau pasien menolak	1. Melakukan advokasi untuk mengaktifkan kembali RW Siaga Sehat Jiwa TPKJM di tingkat kecamatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	PERMASALAHAN	SOLUSI
		untuk akses pelayanan kesehatan atau menutupi kondisi pasien dan menolak keberadaan pasien yang tidak memiliki keluarga 2. Adanya pergantian petugas kesehatan jiwa di Puskesmas	2. Melaksanakan bimbingan teknis bagi petugas kesehatan jiwa
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	1. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tuberkulosis yang melebihi target merupakan indikator positif atas efektivitas pelaksanaan program pelayanan kesehatan sesuai standar. Keberhasilan ini mencerminkan optimalnya upaya penemuan dan pelayanan terhadap orang terduga TBC yang didukung oleh komitmen fasilitas pelayanan kesehatan, penerapan strategi skrining aktif dan	1. Skrining TBC secara aktif dan pasif 2. Penemuan kasus berbasis komunitas 3. Pemeriksaan diagnostik sesuai standar 4. Pelayanan rujukan dan jejaring layanan TBC 5. Edukasi dan promosi kesehatan TBC 6. Penguatan kapasitas SDM kesehatan 7. Pelaksanaan Public-Private Mix (PPM/PPCP) 8. Monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut program 9. Penguatan sistem pencatatan dan pelaporan

No	Jenis Pelayanan Dasar	PERMASALAHAN	SOLUSI
		pasif, serta ketersediaan sarana diagnostik yang memadai. Selain itu, peran aktif sumber daya manusia kesehatan, dukungan kebijakan daerah, dan kolaborasi lintas sektor turut memperkuat cakupan pelayanan, sehingga layanan kesehatan bagi terduga TBC dapat diberikan secara tepat waktu, terukur, dan berkelanjutan	10. Akan dilaksanakannya Kelurahan Siaga TBC
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>human immunodeficiency virus</i>)	1. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) HIV yang melebihi target merupakan indikator positif atas efektivitas pelaksanaan program penanggulangan HIV di daerah	Upaya Peningkatan Upaya Penemuan Kasus Aktif (Active Case Finding). 1. Dilakukannya skrining HIV secara masif melalui layanan PITC (Provider Initiated Testing and Counseling), mobile VCT, serta skrining pada populasi kunci dan kelompok berisiko tinggi menyebabkan jumlah sasaran terlayani meningkat 2. Perluasan dan Penguatan Jejaring Layanan HIV bertambah. Bertambahnya fasilitas pelayanan kesehatan (puskesmas, RS) yang memberikan layanan tes dan pengobatan HIV

No	Jenis Pelayanan Dasar	PERMASALAHAN	SOLUSI
			memperluas akses masyarakat terhadap layanan, sehingga cakupan pelayanan meningkat. 3. Integrasi Layanan HIV dengan Program Kesehatan Lain meningkat. Integrasi layanan HIV dengan layanan TB, KIA terutama pada kelompok ibu hamil, pasien TB, dan pasien rawat inap.

BAB III

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

SPM BIDANG KESEHATAN TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target SPM	Capaian SPM Tahun 2025	Sub Kegiatan	Realisasi Anggaran Tahun 2025 (Rp)
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	97,21%	Pengelolaan Pelayanan kesehatan ibu hamil	308.656.700
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100%	96,82%	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	132.780.000
-3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	97,04%	Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	5.250.475
4	Pelayanan kesehatan balita	100%	93,96%	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita	206.928.000
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100%	100%	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	70.839.775
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100%	100%	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif	31.037.724
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100%	100%	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	76.162.450
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100%	100%	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	7.700.000

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target SPM	Capaian SPM Tahun 2025	Sub Kegiatan	Realisasi Anggaran Tahun 2025 (Rp)
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100%	100%	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	8.400.000
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100%	100%	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100.029.000
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	100%	100%	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	219.747.000
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>human immunodeficiency virus</i>)	100%	100%	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>human immunodeficiency virus</i>)	349.020.925
Jumlah Realisasi Anggaran untuk SPM Bidang Kesehatan Semester 2 Tahun 2025					1.516.552.049

Keterangan :

Perencanaan dan Penganggaran yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan terdapat pada 1 (satu) Program yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dan pada 1 (satu) Kegiatan yaitu Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan penempatan pada 12 (dua belas) Sub Kegiatan sesuai tabel tersebut di atas.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Indikator kinerja SPM bidang kesehatan adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif di bidang kesehatan yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM bidang kesehatan di Kota Cirebon yang berupa masukan, proses, hasil, dan atau manfaat pelayanan. Dinas Kesehatan Kota Cirebon terus mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dalam upaya mengejar target pencapaian SPM Bidang Kesehatan. Dukungan berupa anggaran dan SDM Kesehatan telah mencukupi untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Dukungan dari stakeholders kesehatan yang sudah baik dan terkoordinasi perlu dijaga komitmen dan keberlanjutannya, sehingga upaya mencapai pelayanan yang maksimal di bidang kesehatan untuk masyarakat Kota Cirebon akan dapat diwujudkan.

2. Saran

1. Diharapkan kerjasama lintas sektor dapat lebih ditingkatkan lagi terutama dengan pihak swasta, sehingga pelayanan kesehatan dapat dijangkau dan diperoleh oleh seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kualitas pelayanan sesuai standar
2. Diharapkan upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam meningkatkan cakupan masing-masing indikator yang belum mencapai target diantaranya adalah :
 - Adanya komitmen atau kebijakan bahwa tenaga yang sudah terlatih dan yang telah dibina agar tidak mudah diganti oleh tenaga baru.

- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap petugas/pengelola program di Puskesmas karena ujung tombak pelayanan kesehatan adalah di Puskesmas,
- Memotivasi petugas untuk melakukan kunjungan rumah serta meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk datang ke posyandu dan Posbindu,
- Monitoring dan evaluasi berkala oleh Dinas Kesehatan bersama Lintas Sektor terkait.

**TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
SEMESTER 2 TAHUN 2025**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN (%)	PERHITUNGAN CAPAIAN	JUMLAH SASARAN	PENCAPAIAN (ABSOLUT)	REALISASI CAPAIAN (%)	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	Setiap Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai standar	100%	$\frac{\text{Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil}}{\text{Jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)}} \times 100 \%$	4.054	3.941	97,21	
2	PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	Setiap Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100%	$\frac{\text{Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan}}{\text{Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama.}} \times 100 \%$	4.054	3.925	96,82	

**TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
SEMESTER 2 TAHUN 2025**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN (%)	PERHITUNGAN CAPAIAN	JUMLAH SASARAN	PENCAPAIAN (ABSOLUT)	REALISASI CAPAIAN (%)	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	Setiap Bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar	100%	$\frac{\text{Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir}}{\text{Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$	4.057	3.937	97,04	
4	PELAYANAN KESEHATAN BALITA	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	$\frac{\text{Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar}}{\text{Jumlah Balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja Kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$	17.586	16.523	93,96	

**TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
SEMESTER 2 TAHUN 2025**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN (%)	PERHITUNGAN CAPAIAN	JUMLAH SASARAN	PENCAPAIAN (ABSOLUT)	REALISASI CAPAIAN (%)	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	$\frac{\text{Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran}} \times 100 \%$	53.196	53.196	100	
6	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	Setiap warga negara usia 15 tahun sampai 59 mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	$\frac{\text{Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100 \%$	183.072	183.072	100	

**TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
SEMESTER 2 TAHUN 2025**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN (%)	PERHITUNGAN CAPAIAN	JUMLAH SASARAN	PENCAPAIAN (ABSOLUT)	REALISASI CAPAIAN (%)	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	Setiap warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar	100%	$\frac{\text{Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun (Nominator)}} \times 100\%$	31.385	31.385	100	
8	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	$\frac{\text{Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah estimasi penderita hipertensi usia } \geq 15 \text{ tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.}} \times 100\%$	26.662	26.662	100	

**TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
SEMESTER 2 TAHUN 2025**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN (%)	PERHITUNGAN CAPAIAN	JUMLAH SASARAN	PENCAPAIAN (ABSOLUT)	REALISASI CAPAIAN (%)	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS	Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	$\frac{\text{Jumlah penderita diabetes mellitus usia } \geq 15 \text{ tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah estimasi penderita diabetes mellitus usia } \geq 15 \text{ tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.}} \times 100\%$	5.916	5.916	100	
10	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	Setiap Orang Dengan Gangguan Jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	$\frac{\text{Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja Kab/Kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja Kab/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.}} \times 100\%$	745	745	100	

**TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
SEMESTER 2 TAHUN 2025**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN (%)	PERHITUNGAN CAPAIAN	JUMLAH SASARAN	PENCAPAIAN (ABSOLUT)	REALISASI CAPAIAN (%)	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	Setiap orang terduga Tuberkulosis (TBC) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	$\text{Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai} = \frac{\text{Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun.}}{\text{Jumlah orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama.}} \times 100 \%$	10.627	10.627	100	
12	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI VIRUS YANG MELEMAHKAN DAYA TAHAN TUBUH MANUSIA (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Setiap orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	$\text{Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV dikab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100 \%$	11.533	11.533	100	